

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik pada hakikatnya menyangkut aspek kehidupan yang luas. Pelayanan publik adalah salah satu pelayanan yang di berikan, baik dalam bentuk fisik ataupun jasa yang menjadi tanggungan yang harus diselesaikan dari pihak pemerintah dalam mencapai kebutuhan masyarakat ataupun dalam rangka pelaksanaan sesuai peraturan undang-undang. Kehidupan bernegara, maka pemerintah berfungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk aturan maupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai macam gerakan reformasi publik atau public reform yang dirasakan oleh negara-negara maju pada awal 1990 banyak diilhami dari tekanan masyarakat akan perlu adanya peningkatan dalam kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak mendapat kualitas pelayanan yang sesuai dengan asas & tujuan pelayanan (Pasal 18). Yang paling utama pada pelayanan publik yaitu berkaitan dengan peningkatan dari kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangatlah bergantung pada aspek-aspek sebagai berikut, yaitu pola penyelenggaraan (tata laksana), dukungan dari sumber daya manusia, dan juga kelembagaan. Dalam hal ini peningkatan dari kualitas pelayanan publik yang dimaksud disini yaitu penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan meliputi penetapan kebijakan pembangunan wilayah yang berisiko mengakibatkan

timbulnya bencana, terjadinya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Pasca Bencana). Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2017, tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, terencana, dan menyeluruh; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; menghargai budaya lokal; mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Banjir adalah peristiwa dimana suatu daratan yang biasanya selalu kering (bukan daerah rawa-rawa) menjadi tergenang air, hal ini biasanya disebabkan oleh curah hujan tinggi dan atau kondisi topografi suatu wilayah berupa dataran yang rendah hingga cekung. Selain daripada itu terjadinya banjir jua dapat disebabkan dari luapan air permukaan (*runoff*) yang meluap dan volume airnya melebihi kapasitas dari pengaliran sistem atau aliran sungai. Banjir biasanya terjadi akibat naiknya volume air dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi dan diatas normal, tanggul/bendungan yang bobol, perubahan suhu, serta terhambatnya aliran air di tempat lain (Sarkawi B. Husain 2016).

Banjir bisa memberikan dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, misalnya kesulitan dalam mendapatkan air bersih, kerugian ekonomi, aktivitas masyarakat terhenti, timbulnya wabah-wabah penyakit, hingga dapat memakan korban jiwa. Mengatasi dampak buruk banjir diatas, diperlukan responsivitas yang baik dari lembaga yang ditugaskan untuk menanggulangi banjir. Menurut Dwiyanto (2011: 62) responsivitas sangat berpengaruh dalam pelayanan publik, karena hal

tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, memutuskan agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurut Smith dalam Rusdin (2017:19) mengemukakan bahwa responsivitas adalah kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Menurut Zeithaml dkk (dalam Hardiyansyah 2011:47) Responsivitas adalah kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan. Indikator responsivitas menurut Ziethaml dkk. dalam Hardiyansyah, (2011) yaitu merespon setiap pelanggan, pelayanan dengan cepat, pelayanan dengan tepat, pelayanan dengan cermat, pelayanan dengan waktu yang tepat, dan kemampuan merespon setiap keluhan. Berdasarkan teori tentang pengertian responsivitas tersebut, maka diharapkan lembaga yang bersangkutan dalam penanganan bencana banjir dapat memberikan penanganan yang terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga dampak buruk dari bencana banjir dapat dikurangi.

Lembaga BPBD di Kabupaten Langkat sendiri dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Langkat Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat dan mempunyai tugas utama yaitu menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan dari kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran. Visi dari BPBD Kabupaten Langkat yaitu Terwujudnya Kabupaten Langkat Tangguh dan Tanggap dalam upaya Penanggulangan Bencana yang Terpadu, Efektif dan Efisien, sehingga dengan pemebentukan lembaga ini diharapkan bisa dijadikan sebagai jembatan

pelaksanaan kebijakan dari BNPB tentang penanggulangan bencana; dan penanggulangan bencana bisa ditanggulangi secara cepat dan tepat.

Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang hampir setiap tahun melanda beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, terdapat beberapa Kecamatan yang sering mengalami banjir. Seperti yang kita ketahui, faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya banjir yaitu faktor dari alam dan faktor dari manusia. Faktor dari alam mencakup curah hujan yang tinggi atau musim yang tidak menentu, sedangkan faktor dari manusia meliputi pembuangan sampah sembarang, penggundulan hutan tanpa melakukan reboisasi, tersumbatnya aliran sungai, dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kecamatan Besitang, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), diakibatkan rusaknya Daerah Aliran Sungai Besitang. Salah satu diantaranya adalah kerusakan hutan yang terjadi di sekitar sungai. Sehingga saat curah hujan tinggi, maka tanah menjadi labil dan tidak mampu menampung air lagi. Kerusakan daerah aliran sungai Besitang ini menjadi persoalan utama banjir ditambah dengan kemungkinan ada kayu menumpuk di sungai bagian tetapi hal ini dapat dipastikan karena hasil observasi dilapangan. Akibatnya saat hujan turun dengan tingkat yang tinggi, maka kemampuan untuk menahan tidak ada dan dampaknya kayu tersebut turun bersama dengan laju air yang menyebabkan banjir bandang. (Observasi awal, 27/12/2022)



Gambar 1.1

Fenomena yang terjadi, 100 rumah di Kecamatan Besitang terdampak kena banjir Kab. Langkat Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan sungai meluap seperti yang terjadi di kawasan Kampung Lama, Kecamatan Besitang yang berdampak terhadap 100 rumah warga setempat. Hal itu disampaikan Camat Besitang Ibnu Hajar, Ibnu Hajar menjelaskan 100 rumah warga yang terdampak banjir itu meliputi Lingkungan IV sebanyak 70 rumah dan Lingkungan V sebanyak 30 rumah. Ketinggian air mencapai 40 centimeter, namun warga belum ada yang mengungsi. Pihaknya terus mengimbau warga untuk berhati-hati, bila sewaktu-waktu air terus semakin naikyang dihubungi Minggu (21/11) sekitar pukul 18.00 WIB. <https://sumut.antaraneews.com/11/21/2021>

Pada bulan 3 November Tahun 2022, di Kecamatan Besitang dan Kecamatan Tanjung Pura, semuanya ada 1.319 kepala keluarga. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian BPBD Langkat Irwan Sahri, di Stabat, Kamis (3/11). Irwan Sahr menjelaskan untuk Kecamatan Besitang, banjir terjadi pada (2/11) pukul 07.00 WIB, di Dusun Sidodadi Desa Sekoci Kecamatan Besitang, merendam rumah warga sebanyak 481 KK dengan ketinggian air mencapai bervariasi antara 100-150 centimeter. Sementara ini ada 136 KK, yang mengungsi, ke posko 70 KK dan sebanyak 66 KK mengungsi ke rumah kerabat/keluarga mereka. <https://sumut.antaranews.com>

Untuk upaya yang dilakukan oleh pihak akan terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui puskesmas untuk pelayanan kesehatan, memonitor prakiraan cuaca dan peringatan dini dari website BMKG dan menyampaikan kepada pihak kecamatan atau pihak desa. Termasuk mendirikan tenda pengungsi dan dapur umum di Desa Sekoci Kecamatan Besitang, menyediakan bantuan kebutuhan dasar berupa logistik bagi warga yang mengungsi di posko pengungsian, melaksanakan posko siaga bencana di kantor BPBD Langkat. (<https://sumut.antaranews.com> 3/11/2022).

Tabel 1.1

Data Banjir Sumatera Utara Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	Banjir
1.	Nias	26
2.	Mandailing Natal	34
3.	Tapanuli Selatan	38
4.	Tapanuli Tengah	26
5.	Tapanuli Utara	30
6.	Toba	4
7.	Labuhan Batu	13
8.	Asahan	26

9.	Simalungun	27
10.	Dairi	4
11.	Karo	5
12.	Deli Serdang	50
13.	Langkat	53
14.	Nias Selatan	35
15.	Humbang Hasnundutan	8
16.	Pakpak Bharat	2
17.	Samosir	3
18.	Serdang Bedagai	34
19.	Batu Bara	16
20.	Padang Lawas Utara	16
21.	Padang Lawas	46
22.	Labuhan batu Selatan	14
23.	Labuhanbatu Utara	7
24.	Nias Utara	25
25.	Nias Selatan	8
26.	Sibolga	0
27.	Tanjung Balai	6
28.	Pematangsiantar	0
29.	Tebing Tinggi	15
30.	Medan	45
31.	Binjai	12
32.	Padangsidampuan	3
33.	Gunungsitoli	13

Sumber: BPBD Sumatera Utara 2018-2022

Berdasarkan dari data diatas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat merupakan wilayah yang sering terkena banjir dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Utara. Hal ini yang menjadi fenomena peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut, kemungkinan besar kurangnya responsivitas dari pemerintah setempat dalam mengatasi fenomena banjir di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan fokus mengamati responsivitas penanggulangan banjir di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang dinilai belum sepenuhnya dapat diatasi dengan baik oleh BPBD Kabupaten Langkat. Bencana banjir yang

melanda di beberapa Kecamatan Kabupaten Langkat tiap tahunnya masih dalam penanggulangan terbilang belum cukup optimal. Sehingga masih banyak keluhan dari masyarakat yang terkena dampak fenomena banjir tersebut. Bentuk penanggulangan yang dinilai belum maksimal, seperti lambatnya petugas BPBD turun ke lokasi banjir, kurangnya sarana dan prasana yang disiapkan untuk korban bencana, dan pendistribusian bantuan khususnya sembako dan persediaan obat-obatan pada saat terjadinya bencana banjir kepada korban yang terkena dampak yang masih lambat dan seringkali tidak mencukupi kebutuhan korban banjir. Maka dari itu diharapkan BPBD selaku instansi yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana banjir, dapat memberikan respon yang baik bagi masyarakat yang terkena dampak banjir.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diatas tersebut, maka tepat kiranya jika peneliti mengangkat judul penelitian tentang “**Responsivitas Pemerintah Terhadap Penanggulangan Banjir di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. (BPBD)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada halaman sebelumnya maka dirumuskan beberapa masalah diantaranya

1. Bagaimana Responsivitas Pemerintah Terhadap Penanggulangan Banjir di Kecamatan Besitang?
2. Hambatan apa yang dialami Pemerintah Terhadap Penanggulangan Banjir di Kecamatan Besitang?

1.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah, difokuskan kepada responsivitas pemerintah Kabupaten Langkat dalam penanggulangan banjir kemudian serta hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Langkat dalam mengatasi masalah dalam penanggulangan banjir di Kec. Besitang Kab. Langkat itu sendiri.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Responsivitas Pemerintah Terhadap Penanggulangan Banjir di Kec. Besitang. Kab. Langkat.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Terhadap Penanggulangan Banjir di Kec. Bsitang. Kab. Langkat.

1.5. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini sangat berguna bagi peneliti dan juga Pemerintah Kabupaten Langkat Terhadap Penanggulangan Banjir (BPBD). Adapaun manfaatnya antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan kesempatan untuk dapat menerapkan teori-teori dalam perkuliahan khususnya teori dalam di bidang Kebijakan Publik dalam ke dunia nyata dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan menambah wawasan penelitian terkait Responsivitas Pemerintah Terhadap Penanggulangan Banjir di Kec Besitang Kab. Langkat (BPBD).

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Responsivitas Pemerintah Terhadap Penanggulangan Banjir di Kec Besitang Kab. Langkat (BPBD).